

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS
BUKTI (*EVIDENCE BASED*) PASCA PANDEMI
COVID-19 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :
INDAH PERMATASARI
NIM. 07011381924188**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS
BUKTI (*EVIDENCE BASED*) PASCA PANDEMI
COVID-19 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :
INDAH PERMATASARI
NIM. 07011381924188**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MARET 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS
BUKTI (*EVIDENCE BASED*) PASCA PANDEMI
COVID-19 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

Indah Permatasari

07011381924188

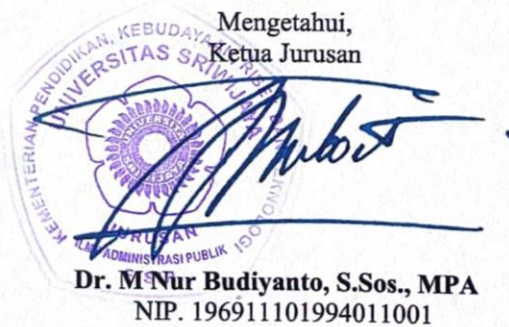
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 02 Maret 2023

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS
BUKTI (*EVIDENCE BASED*) PASCA PANDEMI
COVID-19 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PALEMBANG


SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji pada Tanggal 31 Maret 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

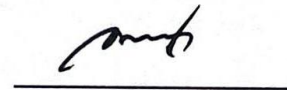
Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Penguji

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Anang Dwi Santoso, SAP, MPA
NIP. 199310072019031012



Mengetahui

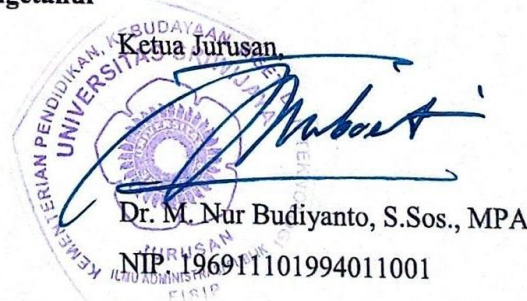
Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfriti, M.Si
NIP. 196601221990031004



Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permatasari
NIM : 07011381924188
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Januari 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti
(*Evidence Based*) Pasca Pandemi Covid-19 Pada
Sekretariat Daerah Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Indah Permatasari
NIM. 07011381924188

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Whatever You Are, Be A Good One”

(Abraham Lincoln)

“Horanghae”

(Hoshi SEVENTEEN)

Atas ridha Allah SWT, penelitian ini saya persembahkan untuk :

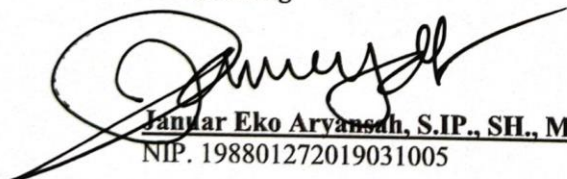
1. Kedua Orangtua saya
2. Keluarga
3. Para Sahabat
4. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
5. Teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019
6. Almamater kebanggaan (Universitas Sriwijaya)

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Berbasis Bukti telah diterapkan dalam perencanaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur. Informan penelitian ini yaitu para pihak yang berhubungan dengan perencanaan anggaran dan pelaporan. Teknik analisis data menggunakan software NVivo, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Di Sekretariat Daerah Kota Palembang telah berjalan sesuai Kebijakan Berbasis Bukti namun masih terdapat kekurangan. Adapun hal yang mendasari yaitu penilaian program pada tahun 2021 dan 2022 telah sesuai dan menjadi acuan dalam perencanaan tahun 2023, pengembangan anggaran yang kurang baik pada tahun 2021 dan 2022 (mengalami penurunan), pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dengan memanfaatkan semua unsur pada tahun yang telah berjalan, hasil pemantauan terhadap realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022 menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun 2023, serta evaluasi yang ditargetkan telah tercapai sehingga tersusunnya rencana anggaran. Adapun saran yang bisa menjadi suatu bahan pertimbangan atau menjadi masukan yaitu agar merancang rencana dengan lebih matang agar realisasi pencapaian anggaran terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini kedepannya akan berdampak baik yaitu tidak terjadi pergeseran anggaran ketika dipertengahan pelaksanaannya. Serta untuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan anggaran, diharapkan adanya peningkatan kelengkapan dan penyediaan data/informasi yang terbaru guna menunjang kualitas perencanaan anggaran.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Kebijakan, Berbasis Bukti

Pembimbing


Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang, 31 Maret 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

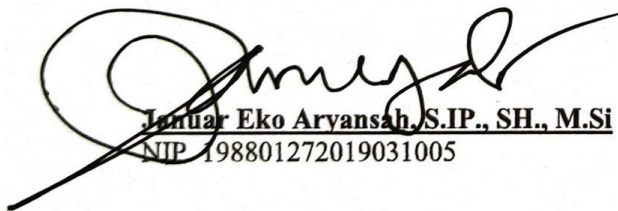

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to determine whether Evidence-Based policies have been applied in budget planning at the Palembang City Regional Secretariat. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. This study used the theory of The Pew Charitable Trust and Mac Arthur. The informants of this research are those related to budget planning and reporting. Data analysis techniques using NVivo software, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that budget planning at the Palembang City Regional Secretariat has been running according to the Evidence-Based Policy but there are still shortcomings. The underlying things are that the assessment of the padda program in 2021 and 2022 has been inaccordance with and has become a reference in planning for 2023, budget development that is lessthan good in 2021 and 2022 (has decreased), the implementation of supervision that has been carried out by utilizing all elements in the current year, the results of monitoring the realization of the 2021 and 2022 budgets become a reference in 2023 budget planning , as well as targeted evaluations have been achieved so that a budget plan is compiled. The suggestions that can be taken into consideration or input are to design a more mature plan so that the realization of budget achievements is realized in accordance with the desired expectations. This in the future will have a good impact, namely there is no budget shift when in the middle of its implementation. As well as for the provision of data and information needed in the budget planning process, it is expected that there will be an increase in completeness and provision of the latest data / information to support the quality of budget planning.

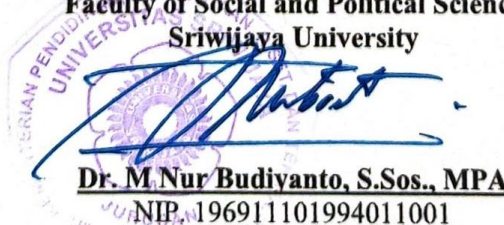
Keyword: Budget Planning, Policy, Evidence-Based

Advisor



Juhar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Palembang, 31 Maret 2023
Chairman of the Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti (*Evidence Based*) Pasca Pandemi *Covid-19* Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang” ini dengan baik. Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, tahun ajaran 2022/2023. Pada kesempatan ini penulis selaku mahasiswa menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi ridho dan perlindungan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar.
2. Keluarga saya, terkhususnya ayah dan mama yang selalu mendukung serta berdoa untuk saya agar diberikan kelancaran untuk menyelesaikan seluruh tugas perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya hingga akhir.

7. Ibu Ety Rossini, S.E., M.M selaku Kabag Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang
8. Bapak R.M. Farid Saleh, S.E., M.M selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pembimbing Teknis
9. Bapak Ario Mahiraja, S.E,AK., M.SI selaku Kasubag Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Palembang
10. Bapak April Meriadi, Bapak Tri Mulyono, Bapak R.M Iman Rifai, kakak Nova Puspita Sari, kakak Nopriansyah Firdaus, kakak Dzulhajri, kakak Edi Kurniawan, kakak Adhim Edhar serta seluruh jajaran staf dan pegawai di Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang telah membimbing kami di kantor dengan sepenuh hati.
11. Yunita Pratiwi, Sherina Ayu Kartini, Riska Pertiwi Ningrum, Andila Ayu Safutri, Wanda Sari Agustiningih dan Annisa Nur Rahmadini, terima kasih telah hadir di kehidupan saya dan memberikan semangat dalam menyusun tugas akhir.
12. Tidak lupa teman-teman saya Amelia Tabita Simbolon, Gloriani Widya Yunitasari, Reza Monica, Anastasya Nur Rahmadini, Lidia. Terima kasih telah hadir di kehidupan perkuliahan saya.
13. Seventeen yang telah memberikan inspirasi dan motivasi melalui karya kepada penulis sehingga penulis tetap kuat dan semangat dalam menyusun tugas akhir.
14. Varel Al-Bukhori, Orfeo Darsa Pradigta, Rigel Asteria, Juandra Yudisthira, Mahesa Akarsena, yang selalu memberi dukungan kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

15. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya maupun Sekretariat Daerah Kota Palembang, khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

Palembang, 31 Maret 2023



Indah Permatasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.2 Kerangka Teori	25
2.3 Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Definisi Konsep	50

3.3 Fokus Penelitian.....	51
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	54
3.5 Informan Penelitian.....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7 Teknik Analisis Data.....	58
3.8 Teknik Keabsahan Data	61
3.9 Sistematika Penulisan	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang	65
4.1.1 Sejarah Singkat.....	65
4.1.2 Visi dan Misi	65
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	66
4.1.4 Struktur Organisasi.....	68
4.1.5 Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	70
4.2 Hasil dan Pembahasan	74
4.2.1 Analisis Penilaian Program	77
4.2.2 Analisis Pengembangan Anggaran.....	85
4.2.3 Analisis Pelaksanaan Pengawasan	95
4.2.4 Analisis Pemantauan Hasil.....	110
4.2.5 Analisis Evaluasi Yang Di Targetkan	116
BAB V PENUTUP	128
5.1 Kesimpulan	128
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Data Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020	9
Tabel 2 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021..	10
Tabel 3 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2022..	11
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 5 Fokus Penelitian	55
Tabel 6 Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kota Palembang	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang....	70
Gambar 3 Bagan Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	70
Gambar 4 Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti.....	75
Gambar 5 Analisis Penilaian Program dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang	77
Gambar 6 Analisis Pengembangan Anggaran dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	86
Gambar 7 Analisis Pelaksanaan Pengawasan dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	95
Gambar 8 Anggaran dan Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang	107
Gambar 9 Prioritas Sekretariat Daerah Kota Palembang	107
Gambar 10 Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Palembang	108
Gambar 11 Target Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	108
Gambar 12 Usulan Program Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020.....	109
Gambar 13 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	109
Gambar 14 Analisis Pemantauan Hasil dalam Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	1106

DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EBP	: Evidence Based Policy
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TOR	: Term of Reference
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RENSTRA	: Rencana Strategis
RENJA	: Rencana Kerja
LKjIP	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IKP	: Indikator Kinerja Program

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	139
Lampiran 2 Surat balasan Instansi.....	140
Lampiran 3 Kartu Konsultasi Bimbingan Usulan Skripsi.....	141
Lampiran 4 Kartu Konsultasi Bimbingan Usulan Skripsi.....	142
Lampiran 5 SK Dosen Pembimbing Skripsi.....	143
Lampiran 6 Pedoman Wawancara.....	144
Lampiran 7 Dokumentasi.....	149
Lampiran 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.....	153
Lampiran 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019.....	154
Lampiran 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.....	155
Lampiran 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.....	156
Lampiran 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 202.....	157
Lampiran 13 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.....	158
Lampiran 14 Lembar Perbaikan Komprehensif.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan secara *universal* didefinisikan selaku aktivitas yang dicoba buat masa yang lebih baik kedepannya dengan mencermati kondisi masa saat ini maupun kondisi pada waktu dulu sekali. Menurut Nasution (2004) dalam Suparmoko (2015) dari perspektif proses keuangan negara, mencakup seluruh aktivitas yang terpaut dengan objek keuangan negara, mulai dari formulasi kebijakan serta pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban. Keuangan negeri pula membahas akibat dari realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, paling utama pada perihal pencapaian tujuan-tujuan aktivitas ekonomi semacam perkembangan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pemasukan, peningkatan efisiensi, serta penciptaan lapangan kerja.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Fardani et al (2021), perencanaan dalam makna luas merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang hendak dicoba guna menggapai sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Rosnidah (2015) perencanaan ialah metode organisasi menetapkan tujuan serta sasaran organisasi yang meliputi kegiatan yang sifatnyan strategis, taktis serta mengaitkan aspek operasional. Perencanaan merupakan bagaimana memakai sumber daya yang ada untuk menggapai tujuan sebanyak mungkin supaya lebih efisien serta efektif.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Bastian (2010:165), perencanaan merupakan cara yang dimula dari penentuan tujuan institusi, ialah memastikan

strategi guna pencapaian tujuan dengan cara menyeluruh dan merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan seluruh pekerjaan institusi, sampai tercapainya tujuan.

Mardiasmo (2018) dalam Evaranus mendefinisikan anggaran selaku pernyataan perihal estimasi kemampuan yang akan digapai sepanjang rentang waktu durasi khusus yang diklaim dalam dimensi keuangan. Sedangkan Halim (2007) dalam Nanda & Darwanis (2016), anggaran ialah suatu konsep yang disusun dalam wujud kuantitatif dalam dasar moneter untuk satu rentang waktu serta rentang waktu anggaran lazimnya dalam waktu durasi satu tahun.

Perencanaan anggaran pada prinsipnya adalah suatu proses mempersiapkan atau penyusunan anggaran pada suatu periode tertentu. Anggaran menghubungkan antara pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2006) dalam Salwah, memiliki empat tujuan, yaitu: 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; 2) Membantu efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas; 3) Membantu pemerintah untuk menetapkan prioritas belanja; dan 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada legislatif dan masyarakat.

Adapun perencanaan anggaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah basis bukti (*evidence based*) pada perencanaan anggaran belanja sekretariat daerah kota Palembang pasca pandemi *covid-19*, yang mana penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan perencanaan anggaran berdasarkan bukti tersebut. Yang mana dalam penerapan kemandirian daerah di Indonesia dimana tiap daerah

diserahkan wewenang untuk membuat serta menata kebijakan daerah guna menaikkan pelayanan masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk tercapainya salah satu tujuan negara ialah untuk peningkatan kesejahteraan publik lewat pemerataan penerapan pembangunan setiap tahun terdapatnya penyusunan dokumen perencanaan dalam setiap daerah. Sudarno (2018) dalam Ramadanti memaparkan kalau Kebijakan berlandas bukti sangat perlu dikarenakan bisa diamati dari sudut efektivitas, efisiensi, penyesuaian layanan masyarakat, akuntabilitas, demokrasi serta kepercayaan.

Analisa berbasis bukti yang tertata ialah unsur yang amat penting dalam semua pembuatan perencanaan yang bagus. Berbagai data butuh dilakukan untuk menciptakan analisis serta bukti yang dibutuhkan pemerintah untuk menguasai dengan betul apakah kebijakan menggapai sasarannya, berjalan sesuai dengan konsep, serta apakah pelayanan sudah diberikan dengan cara efisien. maka, bukti sepatutnya digunakan untuk menunjang pengambilan kebijakan.

Dalam setiap aktivitas perencanaan, harus senantiasa diiringi dengan penganggaran. Selaku instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berperan untuk menciptakan perkembangan serta kestabilan perekonomian, dan pemerataan pemasukan dalam bentuk mencapai tujuan bernegara.

Terdapat kesenjangan yang amat luas antara keinginan pemerintah dan penyelenggara negara dalam penyusunan kebijakan publik atau ketetapan politik dengan bermacam rencana riset dan pengembangan wawasan yang terjalin di universitas. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bersumber pada fakta (*evidence*) berbentuk data, informasi, dan wawasan. Kerap kali kebutuhan politik

sangat dominan dalam pembuatan kebijakan serta melalaikan kedudukan dasar intelektual.

Di sisi lain, agenda penelitian di perguruan tinggi direncanakan dan dilaksanakan semata-mata hanya sebagai pengembangan keilmuan. Banyaknya peraturan daerah yang direvisi bahkan dibatalkan ini dikarenakan kebijakan cenderung diambil dalam waktu singkat, hal yang menjadi catatan mengapa kebijakan kerap tidak menjawab kebutuhan dan tuntutan publik adalah adanya keterbatasan keterlibatan pihak eksternal di luar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan.

Pada umumnya kebijakan publik bersifat *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Kebijakan yang hanya bersifat *top-down* dapat menyebabkan kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Jika pemerintah tidak memiliki informasi serta data yang memadai, maka kualitas kebijakan tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Daerah berkuasa mengatur serta mengurus sendiri masyarakat daerahnya sesuai dengan situasi sosial serta budaya yang ada, dan perencanaan pembangunan serta pengaturan finansial. Pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebaliknya pengaturan perihal Perhitungan Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menata serta memutuskan anggaran yang dibutuhkan,

lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dalam kebijakan daerah yang dijelaskan dengan berbagai program dan aktivitas telah ditentukan anggarannya. Dengan begitu, untuk satu tahun berjalannya kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan publik telah didesain anggarannya dengan sedemikian rupa sehingga telah dipastikan program serta kegiatan bisa dilaksanakan (Mentang et al., 2020; Silaban, 2020) dalam Susilawati et al.

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya serupa dengan pengelolaan keuangan negara, yang mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan guna mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah serta kemampuan organisasi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten atau kota. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berlandaskan prinsip serta azas pengelolaan keuangan daerah yang mesti diatur secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggungjawab dengan memperhatikan dasar keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk publik (Silaban, 2020).

Pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah mempraktikkan kesertaan setiap perangkat kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing yang disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembaruan sektor publik yang diiringi adanya desakan demokrasi menjadi sesuatu fenomena global termasuk Indonesia. Desakan demokrasi ini menimbulkan pandangan transparansi serta akuntabilitas menjadi perihal berarti dalam pengelolaan pemerintah termasuk di aspek pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan anggaran ialah rancangan yang kerap dipergunakan untuk memandangkan kinerja organisasi publik. Peraturan perundang-undangan itu menerangkan bahwa Kepala Daerah atau Bupati menyatakan konsep peraturan daerah tentang pertanggungjawaban penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berbentuk laporan keuangan yang sudah ditilik oleh Dinas Pekerjaan Umum. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut dengan SKPD merupakan bagian kerja Pemerintah Daerah (Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota) yang memiliki kewajiban mengatur anggaran serta SKPD diharuskan untuk menata sesuatu laporan pertanggungjawaban yaitu laporan keuangan SKPD.

Proses penganggaran yakni suatu cara krusial yang tak jarang kali menjadi atensi tersendiri untuk suatu organisasi sektor publik. Pendekatan-pendekatan penyusunan anggaran pula telah bertumbuh sedemikian rupa menjajaki kemajuan era dan dinamika kebutuhan organisasi sektor publik sendiri. Penganggaran sektor publik terkait menggunakan teknik penetapan jumlah alokasi anggaran untuk setiap program kegiatan pada satuan moneter. Anggaran merupakan konsep operasi keuangan, yang meliputi estimasi pengeluaran yang diusulkan, serta sumber pemasukan yang dibutuhkan guna mendanai pada rentang waktu khusus.

Humas (2017) dalam Sekretariat Kabinet menyatakan di Indonesia, pemakaian riset sebagai dasar pembuatan kebijakan belum cukup menyeluruh, walaupun kedudukan peneliti dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan selaku instrumen kebijakan sudah dibuka melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan wajib menyertakan

peneliti. Permasalahan di Indonesia dikala ini yaitu minimnya ikatan antara lembaga penelitian selaku badan fasilitator informasi serta hasil penelitian dengan pihak pengambil kebijakan.

Adanya permasalahan terkait kebijakan publik yang ada di Indonesia disebabkan oleh minimnya penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan pada bukti atau fakta lapangan (*evidence-based*). Pemanfaatan bukti dalam pengambilan kebijakan (*evidence-based policy*) ini terus menjadi penting dan menjadi desakan karena permasalahan kebijakan yang kompleks dan perubahan sosial masyarakat yang semakin dinamis.

Cookson (2005) menyatakan secara definisi, kebijakan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*) adalah seperangkat aturan dan pengaturan kelembagaan yang dirancang untuk mendorong penggunaan bukti yang transparan yang didasarkan pada fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat dan seimbang dalam pembuatan kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang disebut *evidence-based policy* idealnya disusun melalui proses perolehan dan analisis data yang ilmiah, khususnya melalui penelitian (Smith et.al, 2000).

Sudarno (2018) dalam Ramadanti menyatakan bahwa kebijakan berbasis bukti sangat dibutuhkan karena seperti terlihat dari segi efektivitas, efisiensi, kepentingan publik, akuntabilitas, demokrasi dan kepercayaan. Secara sistematis, analisa berbasis bukti merupakan komponen penting dari perencanaan yang baik. Berbagai data perlu dilakukan untuk memberikan analisis dan bukti yang perlu dipahami dengan baik dan diberikan secara efektif. Oleh karena itu, bukti harus digunakan untuk mendukung keputusan kebijakan.

Semenjak terjadinya wabah di Indonesia, pemerintah mengambil aksi pencegahan penyebaran *Covid-19* berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, memuat secara garis besar untuk refocussing kegiatan, realokasi pada anggaran, dan percepatan proses penyediaan barang serta pelayanan guna penanganan virus ini.

Pemerintahan Daerah di Indonesia melaksanakan bermacam usaha guna mengantisipasi baik terhadap penyebaran serta menanggulangi pandemi *Covid-19* terlebih yang berakibat pada aspek kehidupan yang lainnya paling utama perekonomian. Salah satu usaha yang dicoba oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan strategi penyusunan kembali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mana merelokasi serta memusatkan kembali terhadap sektor-sektor yang dikira penting serta mendesak.

Pemerintah Kota Palembang terkhusus Sekretariat Daerah Kota Palembang, yang mana pada tahun 2020, melakukan strategi penyusunan kembali Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah awal dan landasan bagi Pemerintah Kota Palembang melakukan pemberian dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pemulihan dampak ekonomi akibat pandemik *Covid-19*. Pemerintah Kota Palembang bersama DPRD Kota Palembang menindaklanjuti dampak pandemi *Covid-19* dengan melakukan revisi APBD dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya menyediakan anggaran untuk penanggulangan *Covid-19*, adapun besaran perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Data Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja	205.707.231.000	89.778.872.451	(115.928.358.549)	56
a. Belanja Tidak Langsung	47.457.231.000	43.205.357.000	(4.251.874.000)	9
- Belanja Pegawai	47.457.231.000	43.205.357.000	(4.251.874.000)	9
b. Belanja Langsung	158.250.000.000	46.573.515.451	(111.676.484.549)	71
- Belanja Pegawai	4.217.113.000	4.017.113.000	0,00	0
- Belanja Barang dan Jasa	131.037.787.000	36.632.665.053	(94.405.121.947)	72
- Belanja Modal	22.995.100.000	4.873.737.398	(18.121.362.602)	79
Surplus/(Defisit)	(205.757.231.000)	(89.778.872.451)	115.938.358.548	56

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2020

Tabel 1 di atas menjelaskan terjadi pergeseran anggaran pada perubahan DPPA SKPD tahun 2020. Perubahan anggaran secara ringkas diuraikan dengan beberapa komponen, yaitu jumlah belanja secara menyeluruh mengalami penurunan sebesar Rp. 115.938.358.548,00 yang mana sebelum mengalami perubahan sebesar Rp. 205.757.231.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 89.778.872.451,00 (berkurang 56% dari anggaran sebelumnya).

Total belanja tidak langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp. 4.251.874.000,00 atau yang dari sebelumnya sebesar Rp. 47.457.231.000,00 dan setelah mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 43.205.357.000,00. Serta total belanja langsung yang mengalami perubahan yang semula sebesar Rp. 158.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 46.573.515.451,00 atau dapat diketahui

mengalami penurunan sebesar Rp. 111.676.484.549,00 (berkurang 71% dari anggaran sebelumnya). Pada anggaran belanja langsung mengalami pergeseran anggaran yang signifikan dari pada belanja tidak langsung. Belanja modal mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 18.121.362.602,00 atau 79% dari anggaran sebelum mengalami pergeseran yaitu Rp. 22.995.100.000,00

Perubahan struktur pada komponen anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat daerah kota Palembang berakibat pada berubahnya komposisi anggaran, yang disebabkan karena adanya perubahan anggaran dalam penanganan *Covid-19*.

Tabel 2 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja	
a. Belanja Operasi	148.857.686.383
- Belanja Pegawai	57.523.275.636
- Belanja Barang dan Jasa	90.339.410.747
- Belanja Hibah	995.000.000
b. Belanja Modal	13.630.675.200
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.625.275.200
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.005.400.000
Jumlah Belanja	162.488.361.583
Surplus/(Defisit)	(Rp. 162.488.361.583)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2021

Berdasarkan Dokumen Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 2 diatas bahwa pada tahun 2021 jumlah belanja yang dianggarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar Rp. 162.488.361.583. Anggaran pada tahun 2021 telah menghadapi kenaikan dari tahun terdahulu sebab pada tahun ini merupakan peralihan dari pandemi menjadi endemik atau pemerintah menyebutnya sebagai era *Era New Normal*.

Tabel 3 Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja	
a. Belanja Operasi	124.471.586.019
- Belanja Pegawai	39.289.000.814
- Belanja Barang dan Jasa	83.924.085.205
- Belanja Hibah	1.258.500.000
b. Belanja Modal	4.218.640.000
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.069.340.000
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.149.300.000
Jumlah Belanja	128.690.226.019
Surplus/(Defisit)	(Rp. 128.690.226.019)

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3 jumlah belanja yang dianggarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 128.690.226.019,00.

Anggaran belanja Setda Kota Palembang kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 47.633.810.764,00.

Oleh karena itu dapat dilihat dari ketiga tabel diatas dengan tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, anggaran dana yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang dari masa pandemi *Covid-19* hingga *era new normal* tidak konsisten atau mengalami naik-turun dalam anggaran yang telah disetujui.

Secara umum penelitian mengenai perencanaan anggaran berbasis bukti di indonesia masih terbatas, karena dalam proses perencanaan anggaran banyak dari para pemangku kebijakan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Perencanaan anggaran berbasis kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya serta efektivitas dalam penggunaannya yang diharapkan dapat terserap secara optimal.

Sebagai landasan dasar pada perencanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagaimana tertera pada undang-undang perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagai dasar dalam

perencanaan pembangunan di Kota Palembang dari turunan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Maka dari itu berdasarkan uraian fenomena diatas yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan bukti dalam perencanaan anggaran pada sekretariat daerah kota palembang dengan judul: **“Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Bukti (*Evidence Based*) Pasca Pandemi Covid-19 Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan, hingga kesimpulan permasalahan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perencanaan anggaran berbasis bukti (*evidence based*) pasca pandemi covid-19 pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran berbasis bukti (*evidence based*) pasca pandemi Covid-19 pada sekretariat daerah kota palembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bidang Administrasi Publik, khususnya terkait perencanaan anggaran berbasis bukti dan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran dan masukan serta sebagai evaluasi bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang khususnya pada perencanaan anggaran dan dapat juga sebagai acuan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2000). *Introducing evidence-based policy and practice in public services. In What works?*. UK: Policy Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: UNISMA.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Parkhurst, J. (2017). The politics of evidence: from evidence-based policy to the good governance of evidence (p. 182). Taylor & Francis.
- Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Bagian I Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi Dpr Ri Dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta
- Rosnidah, Ida. (2016). *Keuangan Negara dan daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Sherman, L. W. (1998). *Evidence-based policing*. Washington, DC: Police Foundation.

- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2015. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*. Yogyakarta: BPFPE.
- Tanjung, Bahdin Nur, & Ardial, H. (2008). *Pedoman penulisan karya ilmiah : (proposal skripsi dan tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah* Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta : Kencana.

Artikel Jurnal:

- Adriansyah, A. A., Firdausi, N. J., & Wulan, T. D. (2019). Pengenalan Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti: Studi Di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. (*Jurnal Ilmiah Pangabdhi*). 5(2), 62-67.
<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6071>
- Ainy, A. (2012). Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. (*Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*): JKKI, 1(1).
- Ahmari, A., & Amar, S. (2014). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Kepulauan Mentawai. (*Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*), 2(3).

- Asmara, A. Y., & Handoyo, S. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. (*STI Policy and Management Journal*), 13(1), 38-57. <http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38>
- Aarons, G. A., Hurlburt, M., & Horwitz, S. M. (2011). Advancing a conceptual model of evidence-based practice implementation in public service sectors. (*Administration and policy in mental health and mental health services research*), 38(1), 4-23. <https://doi.org/10.1007/s10488-010-0327-7>
- Ariesmawati, Yulia. (2020). Pengaruh Perencanaan dan Penganggaran terhadap Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. (*Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*). 6(2), 258-269. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.13>
- Bachtiar, P.P. (2011). Menghasilkan Bukti Sebagai Informasi Bagi Proses Penyusunan Kebijakan Di Indonesia: Tantangan Pada Sisi Penawaran. Newsletter Smeru.
- Cookson, R. (2005). Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn't. (*Journal of Health Services Research & Policy*), 10(2), 118-121. <https://doi.org/10.1258/1355819053559083>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). Evidence Based Policy. (*Treasury Policy Brief. 12*)
- Ermadiani, E., Ubaidillah, U., & Abdulrohman, A. (2021). Penerapan e-Planning di Kota Palembang. (*Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*), 18(1), 109-122. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v18i1.13448>

- Hakim, Abdul., Makmur, M. & Adhi, Kuncoro. (2019). Proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Profit: (*Jurnal Administrasi Bisnis*). 13(1), 47-62.
<https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.6>
- Head, Brian. (2010). *Evidence-based policy: principles and requirements. Strengthening evidence based policy in the australian federation*, 1(1)
- Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. (*Canadian public administration*), 52(2), 153-175.
https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.2009.00070_1.x
- Gabby, M. (2015). Prinsip Evidence Based Policy Making Dalam Konteks Audit Pendahuluan Operasional BPJS Kesehatan. *In Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2(1), 301-308.
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. (*Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*), 13(2), 108-117.
<https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Makbul, M. (2021). Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- Muchtar, M., & Sulistiadi, W. (2019). Metode Pendekatan Top-down dan Bottom-up: Strategi Marketing Penetapan Harga di Pelayanan Kesehatan. (*Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*). 5(1).
<http://dx.doi.org/10.7454/arsi.v5i1.2863>
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*), 1(1), 327-340.

- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. (*Jurnal riset akuntansi terpadu*), 10(1). <http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi. (*Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*), 20(3), 78-91. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32800.20.3.2019>
- Ruggeri, Kai. (2014). An implementation pilot of the MindBalance web-based intervention for depression in three IAPT services. (*The Cognitive Behaviour Therapist*). 7. 1-22. <https://doi.org/10.1017/S1754470X14000221>.
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. (*Jurnal Transformasi Administrasi*), 9(2), 164-182.
- Sanderson, Ian. (2002). Evaluation, policy learning and evidence-based policy making. *Public administration*, 80(1), 1-22. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292>
- Subhan, H. (2019). Evidence-based policy and practice: tantangan dan pengembangan. (*JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*), 9(1), 82-96. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4499>
- Susilawati, S., Saepudin, A., Kushendar, D. H., & Nurfadhillah, A. (2021). Strategi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bogor

Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Nusantara: (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 8(6), 1349-1359. <http://doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1349-1359>

Suyadnya, K., Meitriana, M. A., & Zuhri, A. (2014). Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Dalam Evaluasi Kinerja Perusahaan Ud Agus Kusuma. (*Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*), 4(1).

<https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.2296>

Trusts, P. C. MacArthur Foundation. (2014). Evidence-Based Policymaking: A Guide for Effective Government.

Wijayanti, A. W., Muluk, M. R. K., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. (*Wacana Journal of Social and Humanity Studies*), 15(3), 10-17.

Skripsi, dan Tesis atau Disertasi:

Ramadanti, V. (2020). *Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)*. Disertasi doktoral. Makassar: Program Studi Ekonomi Pembangunan. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/16536>

Nur, Hamsiah. (2021). Perencanaan Berbasis Bukti Di Kabupaten Maros. Disertasi doktoral. Makassar: Program Magister Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11957>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Website Resmi:

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). Kebijakan Berbasis Penelitian.
(diakses pada 20 September 2022). <http://setkab.go.id/kebijakan-berbasis-penelitian>

BPPKPD. (2019). *e-Planning*. (diakses pada 17 November 2022).
<https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-planning/>